

## ABSTRAK

Konvensi Hak Anak sebagai perjanjian internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disetujui oleh negara-negara anggotanya merupakan perjanjian yang menjamin tentang hak-hak anak sebagai acuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi anak-anak di seluruh dunia. Maka dari itu, Konvensi Hak Anak menentang semua tindakan pelanggaran terhadap hak anak, salah satu pelanggaran terhadap hak anak yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah pernikahan anak. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap perjanjian internasional, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Kemudian mentransformasikannya ke dalam hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Untuk menjamin hak anak, pemerintah menurunkan Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, kemudian undang-undang tersebut menjadi acuan bagi peraturan turunan lainnya untuk menangani pelanggaran hak anak, termasuk pernikahan anak. Pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan jumlah pernikahan anak yang tinggi, namun jumlahnya kian menurun sejak diterbitkannya kebijakan Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pernikahan anak.

**Kata Kunci:** Konvensi Hak Anak, Indonesia, Kabupaten Gunungkidul, Pernikahan Anak

## ABSTRACT

*The Convention on the Rights of the Child as an international treaty drafted by the United Nations and issued by its member states constitutes an agreement that guarantees the rights of the child as a reference to bringing about a decent life for children throughout the world. Therefore, the Convention on the Rights of the Child opposes any treatment that violates the rights of the child, one of the things that violates the right of the child to be focused in this paper is child marriage. As a form of approval of international treaties, Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child. Then transform it into the law applicable in the jurisdiction of Indonesia. To guarantee the rights of children, the government changed the Convention on the Rights of the Child into Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, then the law became a reference for other derivative rules to handle child rights abuses, including child marriages. The marriage of children in Gunungkidul District, Daerah Istimewa Yogyakarta Province became one of the areas with high amount of child marriage, but the amount keeps deacresing after the policies related to child marriage are published by the Government of Gunungkidul District.*

**Keywords:** *The Convention on the Rights of the Child, Gunungkidul District, Child Marriage*